

Pengaruh Koordinasi Kelurahan Dalam Pengelolaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan

Nabila Alya

¹Ilmu Administrasi Publik, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Jl. Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

Nabilalya123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Koordinasi Kelurahan Dalam Pengelolaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan penelitian berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa koordinasi yang dilakukan kelurahan dalam kegiatan ketertiban umum belum efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan komunikasi serta kerjasama yang dilakukan pihak kelurahan dengan melibatkan seksi ketentraman dan ketertiban umum, kepala lingkungan serta masyarakat Kelurahan Pahlawan, belum mampu mengajak semua masyarakat Kelurahan Pahlawan untuk berpartisipasi ikut serta dalam kegiatan ketertiban umum. Kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh belum kuatnya kelurahan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat serta memberikan sosialisasi akan pentingnya keberadaan pos keamanan. Dalam melakukan kerjasama, pihak kelurahan melibatkan seksi ketentraman dan ketertiban umum yang berjumlah 3 orang dan seluruh kepala lingkungan sebanyak 10 orang untuk mencapai ketertiban umum di Kelurahan Pahlawan. Dalam proses kerjasama yang dilakukan Kelurahan Pahlawan mengedepankan aspirasi masyarakat sehingga semua pihak yang ikut serta dalam kerjasama bisa mencapai hasil akhir dari diselenggarakannya kegiatan ketertiban umum.

Kata Kunci: *Efektivitas, Koordinasi, Ketertiban umum*

1. PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 pasal 3 ayat 1, Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut lurah mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, untuk itu lurah harus selalu berkoordinasi dengan sekretaris dalam menyusun rencana dan program pembinaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu koordinasi yang baik sangat diperlukan dalam suatu kegiatan pemerintahan kelurahan, karena tanpa adanya koordinasi yang baik maka pelaksanaan tugas – tugas di kelurahan tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan “Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Peraturan Daerah (Perda) berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP), dipimpin oleh lurah yang didalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan tugas dari Bupati/Walikota”.

Dalam rangka pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum perlu adanya koordinasi kelurahan serta pembinaan seksi ketentraman dan ketertiban umum dan kepala lingkungan yang dilakukan secara intensif agar unit kelurahan ini dapat melaksanakan tugas serta fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan. Koordinasi diperlukan dalam setiap unit kerja utamanya birokrasi pemerintah karena adanya pembagian kerja dan spesialisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan koordinasi yang baik diharapkan semua unit kelurahan dapat melaksanakan tugasnya dengan lancar dan senantiasa berorientasi pada tujuan kerja yang sama dalam melaksanakan fungsinya. Koordinasi yang dilakukan oleh kelurahan bertujuan untuk menciptakan dan memelihara efektivitas lembaga-lembaga yang menjadi unit kelurahan sehingga kegiatan ketentraman dan ketertiban umum dapat berjalan efektif. Seksi ketentraman dan ketertiban umum sebagai unit kelurahan dalam hal ini bertugas melaksanakan kegiatan penyediaan pos keamanan kelurahan serta pengadaan dan penguatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban kelurahan dilingkungan masyarakat Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan.

Kelurahan Pahlawan merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan yang berkembang sebagai daerah jasa perdagangan, permukiman dan lain-lain. Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan memiliki 1.855 KK yang terdiri atas 15 (lima belas) lingkungan. Tetapi hanya memiliki 3 pos keamanan yang aktif berjalan hingga sekarang yang di setiap pos keamanan disediakan 5 tenaga keamanan, yang di tempatkan di lingkungan yang dianggap rawan kejahatan oleh masyarakat setempat yakni lingkungan 8 , lingkungan 9 dan lingkungan 13. Dari 15 lingkungan yang terdapat di Kelurahan Pahlawan idealnya memiliki 10 pos keamanan guna menjaga keamanan lingkungan perumahan masyarakat Kelurahan Pahlawan Kota Medan, mengurangi tingkat kriminalitas, mempererat tali silaturahmi antar warga, pembinaan moral dan membangun disiplin warga.

Kendala yang dimiliki seksi ketentraman dan ketertiban umum serta kepala lingkungan adalah pengadaan tenaga keamanan serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal iuran yang ditetapkan untuk berjaga malam. Dalam hal rekrutmen tenaga keamanan dilakukan melalui musrembangkel (musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan) yang dilakukan oleh kelurahan serta seksi ketentraman dan ketertiban umum dan kepala lingkungan (Kepling), tenaga

keamanan yang di rekrutmen berasal dari masyarakat setempat yang dianggap kompeten dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Berdasarkan hasil musyawarah masyarakat dibebankan biaya keamanan sebesar Rp.25.000/KK bagi rumah tinggal tanpa usaha tambahan dan Rp.50.000 – 100.000/KK bagi rumah dengan usaha tambahan seperti usaha jual beli besi yang putusannya diberitahukan kepada masyarakat kelurahan pahlawan melalui surat edaran yang dibagikan oleh tiap kepala lingkungan (Kepling). Namun hal ini tidak berjalan sesuai rencana yang mana dari 1.855 KK hanya 422 KK atau sekitar 5,52% KK yang ikut berpartisipasi dalam pemungutan uang keamanan kelurahan. Sehingga dana yang terkumpul untuk pembiayaan keamanan itu sangat minim, selain dana yang minim, maka upaya untuk penambahan pos keamanan dan tenaga keamanan menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman umum di Kelurahan Pahlawan.

Dari permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat dalam hal keamanan masih rendah yang dibuktikan dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemungutan biaya keamanan kelurahan. Dalam mengatasi masalah ini perlu adanya koordinasi antara lurah dan seksi ketentraman dan ketertiban umum serta kepala lingkungan untuk menggerakkan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam mewujudkan keamanan di Kelurahan Pahlawan, sehingga dapat mendorong efektivitas kegiatan ketentraman dan ketertiban umum sangat diperlukan keselarasan, kesepakatan antara lurah dan seksi ketentraman dan ketertiban umum serta kepala lingkungan.

2. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif dan dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam meneliti secara rinci mengenai suatu objek dengan cukup mendalam dan menyeluruh mengenai efektivitas koordinasi Kelurahan dalam pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan.



Gambar 1. Kerangka Konsep

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian dalam bentuk kata atau bahasa dalam meneliti sekelompok manusia atau objek untuk memahami fenomena yang terjadi.

3. HASIL

Deskripsi Hasil Wawancara

Adanya kerja sama antara lurah dan seksi ketentraman dan ketertiban umum dalam pelaksanaan kegiatan ketertiban umum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 dengan Bapak Tongku Panusunan Siregar, SH selaku Lurah Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan mengatakan dalam melakukan kerja sama melibatkan kepala lingkungan serta seksi ketentraman dan ketertiban umum tentang kegiatan pengadaan pos keamanan serta pengadaan tenaga keamanan di setiap lingkungan Kelurahan Pahlawan.

Senada dengan itu, Ibu Devi Afrianti, SE selaku sekretaris Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan, mengatakan dalam menciptakan kesatuan dan kesepahaman dengan pihak yang terkait dan juga masyarakat kelurahan melakukan musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan) dengan berbasaskan semangat budaya kekeluargaan, gotong royong, dan swakarsa. Kelurahan selalu melibatkan masyarakat dalam setiap pembangunan yang dilakukan oleh kelurahan agar setiap masyarakat dapat mengetahui setiap kegiatan pembangunan yang telah direncanakan kelurahan untuk masyarakat.

Selain itu, Ibu Lukertina Sianturi, SH selaku kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum Kelurahan Pahlawan mengatakan dalam proses musrembang yang dilakukan bersama dengan masyarakat untuk mencapai tujuan terwujudnya ketertiban umum di kelurahan pahlawan belum berjalan efektif dikarenakan masyarakat lebih memilih tidak ikut serta dalam kegiatan musrembang yang dilakukan kelurahan.

Adanya keselarasan mengenai capaian atau tujuan dari kegiatan pelaksanaan ketertiban umum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arfanyah Putra, ST selaku Kepala Lingkungan IV (Empat) Kelurahan Pahlawan, mengatakan hambatan yang dialami lurah dalam melaksanakan kegiatan pengadaan pos keamanan serta pengadaan tenaga keamanan ialah masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan pengadaan pos keamanan serta pengadaan tenaga keamanan, Kelurahan Pahlawan telah merealisasikan dana kelurahan melalui pengadaan sarana untuk keperluan pos keamanan seperti : pentungan, senter, lampu darurat dan jaket hujan. Pengadaan pos keamanan ini kurang di didukung oleh masyarakat sebab masyarakat berpikir mereka tidak memerlukan tenaga keamanan serta pos keamanan dikarenakan masyarakat dapat menjaga rumah mereka sendiri. Namun hal tersebut bertentangan dengan

masyarakat yang lingkungan tempat mereka tinggal sekaligus berwirausaha jual beli besi dan kayu dimana mereka sangat membutuhkan pos keamanan dan tenaga keamanan untuk berkeliling mengawasi lingkungan tempat mereka tinggal.

Senada dengan itu, Ibu Lukertina Sianturi,SH selaku seksi ketentraman dan ketertiban umum Kelurahan Pahlawan mengatakan dalam mengarahkan pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, lurah selalu turut serta dalam mengawasi setiap proses setiap kegiatan pengadaan pos keamanan di kelurahan pahlawan, dimulai dari proses perencanaan hingga musyawarah yang dilakukan untuk membahas pembangunan pos keamanan, penyediaan tenaga keamanan, penyediaan sarana keperluan tenaga keamanan.

Hal lain juga disampaikan Bapak Tongku Panusunan Siregar,SH selaku Lurah Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan bahwa belum tercapainya sasaran dari kegiatan ketertiban umum dikarenakan sulitnya untuk memotivasi masyarakat akan pentingnya ketertiban dan ketentraman umum di lingkungan kelurahan. Dapat disimpulkan bahwa keselarasan dari capaian kegiatan ketertiban umum di kelurahan pahlawan belum bisa berjalan dengan semestinya karena kelurahan belum sepenuhnya bersosialisasi dengan masyarakat tentang pemungutan uang keamanan.

Adanya komunikasi antara lurah dan seksi ketentraman dan ketertiban umum mengenai kegiatan ketertiban umum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tongku Panusunan Siregar,SH selaku Lurah Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan mengatakan, dalam menciptakan komunikasi yang efektif dengan seksi ketentraman dan ketertiban umum serta kepala lingkungan dengan cara sering bertukar pikiran mengenai apa yang menjadi kritikan masyarakat, dikarenakan lurah tidak dapat setiap saat memonitoring apa yang terjadi di masyarakat maka kepala lingkungan yang bertugas menyampaikan saran dan kritik yang ada di setiap lingkungan kelurahan dapat menyampaikannya dengan lurah untuk di bahas bersama untuk menanggulangi apa yang menjadi kritikan masyarakat. Lurah juga melakukan diskusi dengan perangkat kelurahan lainnya mengenai setiap kegiatan yang direncanakan dengan duduk bersama.

Senada dengan itu, Ibu Devi Afrianti,SE selaku Sekretaris Kelurahan Pahlawan menyampaikan dalam proses penyampaian informasi bapak lurah menggunakan rapat dan musrembang sebagai wadah untuk membahas setiap kegiatan kelurahan, dalam rapat ini juga perangkat kelurahan serta masyarakat kelurahan di berikan kesempatan untuk menyampaikan pemikirannya untuk kemajuan Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan.

Bapak Arfansyah Putra, ST selaku Kepala Lingkungan IV (Empat) Kelurahan Pahlawan menambahkan bahwa komunikasi berupa rapat yang dilakukan kelurahan kepada setiap kepala lingkungan mengenai kegiatan ketertiban umum dalam hal penyediaan pos keamanan mendapat hambatan yang mana lurah kurang berkoordinasi dengan kepala lingkungan menyebabkan kurangnya informasi yang disampaikan kembali dari kepala lingkungan kepada masyarakat mengenai kegiatan ketertiban umum di Kelurahan Pahlawan.

Saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing – masing pihak yang turut serta dalam kegiatan ketertiban umum

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Devi Afrianti, SE selaku sekretaris Kelurahan Pahlawan mengatakan, setiap rapat yang diselenggarakan kelurahan untuk membahas kegiatan serta perencanaan pembangunan kelurahan. Lurah sebagai pemimpin rapat selalu mementingkan kepentingan masyarakat untuk memajukan masyarakat di kelurahan pahlawan. Dalam melakukan rapat, masing – masing perangkat kelurahan saling menghargai wewenang masing-masing dengan tidak melewati apa yang tidak menjadi wewenangnya. Seksi ketentraman dan ketertiban umum serta kepala lingkungan bekerja sama untuk memelihara ketentraman dan ketertiban di lingkungan kelurahan pahlawan dengan cara menyediakan pos keamanan serta pengadaan tenaga keamanan untuk menjaga lingkungan kelurahan. Lurah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di kelurahan mempunyai peranan sebagai seorang yang mengarahkan serta memberikan pembagian kerja kepada setiap unit perangkat kelurahan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Devi Afrianti, SE selaku sekretaris Kelurahan Pahlawan mengatakan, setiap rapat yang diselenggarakan kelurahan untuk membahas kegiatan serta perencanaan pembangunan kelurahan. Lurah sebagai pemimpin rapat selalu mementingkan kepentingan masyarakat untuk memajukan masyarakat di kelurahan pahlawan. Dalam melakukan rapat, masing – masing perangkat kelurahan saling menghargai wewenang masing-masing dengan tidak melewati apa yang tidak menjadi wewenangnya. Seksi ketentraman dan ketertiban umum serta kepala lingkungan bekerja sama untuk memelihara ketentraman dan ketertiban di lingkungan kelurahan pahlawan dengan cara menyediakan pos keamanan serta pengadaan tenaga keamanan untuk menjaga lingkungan kelurahan. Lurah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di kelurahan mempunyai peranan sebagai seorang yang mengarahkan serta memberikan pembagian kerja kepada setiap unit perangkat kelurahan.

4. PEMBAHASAN

Adanya kerja sama antara lurah dan seksi ketentraman dan ketertiban umum dalam pelaksanaan ketertiban umum

Kerja sama sangat penting dalam hubungan yang harmonis antara pimpinan dengan pegawai yang memegang peranan strategis bagi organisasi, terutama dalam kegiatan operasional organisasi membutuhkan kerja sama yang saling mendukung dan mempengaruhi di antara berbagai elemen yang ada dalam organisasi. Kerja sama merupakan suatu bentuk perwujudan daripada hubungan antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha mencapai tujuan bersama.

Dapat penulis simpulkan bahwa kerja sama akan berjalan efektif apabila atasan dapat berkerja sama dengan bawahannya hingga dapat tercapainya tujuan bersama. Kerjasama yang efektif dapat dilihat dari cara pemimpin menjalankan tugasnya sehingga terlihat koordinasi antara pemimpin dan bawahan, kerja sama akan efektif apabila dilakukan atau dijalankan dengan masyarakat juga, bukan hanya dengan perangkat kelurahan/bawahan. Kerjasama dengan bawahan yang dimaksud adalah kelurahan dalam mengambil keputusan dengan cara musyawarah dan cenderung melibatkan bawahan, mendorong partisipasi dalam memutuskan metode dan sasaran kegiatan kerja guna mencapai ketertiban umum di kelurahan.

Hal tersebut menunjukkan, bahwa kerjasama yang dilakukan Kelurahan Pahlawan dengan perangkat kelurahan belum maksimal, karena kerjasama yang dilakukan Kelurahan Pahlawan hanya melibatkan dan menunjuk kepala lingkungan serta seksi ketentraman dan ketertiban umum, lurah tidak turun langsung ke lapangan untuk melihat apa yang menjadi kendala dalam kegiatan ketertiban umum ini sedangkan lurah bertugas sebagai pemelihara ketentraman dan ketertiban umum.

Adanya Keselarasan mengenai capaian dari kegiatan pelaksanaan ketertiban umum

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan didapatkan bahwa, dalam meyelaraskan tujuan kegiatan ketertiban umum, pihak kelurahan melibatkan seksi ketentraman dan ketertiban umum serta kepala lingkungan melakukan rapat serta musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) dengan mengikutsertakan masyarakat, yang diselenggarakan seminggu 2 kali yaitu di hari rabu yang bertempat di balai kantor kelurahan dan di hari minggu dilakukan di setiap lingkungan bersama masyarakat Kelurahan Pahlawan. Dalam proses rapat serta musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) yang dilakukan Kelurahan Pahlawan, pihak kelurahan mengedepankan aspirasi masyarakat sehingga semua pihak yang ikut serta dalam rapat mengenai kegiatan ketertiban umum bisa mencapai hasil akhir dari diselenggarakannya kegiatan ketertiban umum di Kelurahan Pahlawan. Kegiatan ketertiban umum yang diselenggarakan Kelurahan Pahlawan memiliki tujuan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, mempererat tali silaturahmi antar warga, serta sebagai pembinaan moral dan membangun disiplin warga.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Juli 2020 dengan Bapak Tongku Panusunan Siregar.SH, beliau mengatakan bahwa sulit untuk bisa melaksanakan kegiatan ketertiban umum ini disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat untuk turut serta menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan dan membayar iuran ketertiban umum, sedangkan Kelurahan Pahlawan sendiri telah menyediakan pos keamanan dan sarana kebutuhan untuk berjaga malam juga telah di sediakan, dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat ini pos keamanan yang telah di sediakan menjadi terabaikan dan tidak sesuai dengan fungsi awalnya. Hanya ada 3 pos keamanan yang sampai saat ini aktif berjalan sebagaimana fungsinya yaitu di lingkungan 8, lingkungan 9, dan lingkungan 13 dilengkapi dengan 5 tenaga keamanan yang berjaga bergantian setiap malamnya.

Adanya komunikasi antara lurah san seksi ketentraman dan ketertiban umum mengenai kegiatan ketertiban umum

Komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses dimana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak berkaitan. Dalam sebuah organisasi didalamnya terdiri atas orang-orang (organ) yang memiliki tugas masingmasing serta saling berkaitan satu sama lain sebagai suatu sistem tentu memerlukan komunikasi yang baik agar kinerja oraganisasi berjalan dengan baik pula. Sehingga apa yang menjadi tujuanya dapat tercapai.

Dapat penulis simpulkan bahwa komunikasi yang terjadi antara pihak kelurahan dalam kerjasama yang melibatkan seksi ketentraman dan ketertiban umum serta

kepala lingkungan merupakan komunikasi vertikal yaitu komunikasi yang terjalin dari atas ke bawah dan komunikasi atau interaksi ini terjadi secara timbal balik. Interaksi atau komunikasi yang terjalin antara pihak kelurahan dengan masyarakat belum efektif dikarenakan dalam kerjasama yang dilakukan kelurahan masih banyak masyarakat yang tidak ingin turut serta dengan membayar biaya keamanan sebesar Rp.25.000/KK bagi rumah tinggal tanpa usaha tambahan dan Rp.50.000 – Rp.100.000/KK bagi rumah dengan usaha tambahan jual beli besi. Dari 1.855 KK di Kelurahan Pahlawan hanya 422 KK atau sekitar 5,52% KK yang ikut turut serta dalam kegiatan ketertiban umum di Kelurahan Pahlawan. Dalam melakukan kerjasama pihak kelurahan melibatkan masyarakat Kelurahan Pahlawan yang dijumpai oleh kepala lingkungan yang bertugas menyampaikan dan memberi pemahaman mengenai tujuan kegiatan ketertiban umum yang diselenggarakan Kelurahan Pahlawan.

Saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak yang turut serta dalam kegiatan ketertiban umum

Wewenang (Authority) merupakan suatu wadah yang berfungsi sebagai penggerak dari pada kegiatan-kegiatan. Tanpa wewenang orang-orang (organ) dalam organisasi. Wewenang bersifat formal, untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Disamping itu wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan yang ada dalam organisasi. Di dalam fungsi pengorganisasian, seorang atasan berdasarkan posisinya mempunyai hak ataupun wewenang untuk menjalankan atau memberikan perintah kepada bawahannya untuk menjalankan wewenangnya. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.

Dapat penulis simpulkan bahwa Wewenang (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Wewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan ke bawahan dalam suatu organisasi. Dari hasil yang penulis dapatkan di lapangan ditemui bahwa lurah sebagai pemegang wewenang tertinggi di Kelurahan Pahlawan sudah cukup baik dalam menggunakan haknya untuk memerintah organ organisasi yang terdapat di kelurahan, dilihat dari keterlibatan lurah dalam kegiatan ketertiban umum di kelurahan belum maksimal sebagai penyelenggara kegiatan ketertiban dan ketentraman umum. Dalam melakukan kerjasama lurah memegang kekuasaan sebagai penyelenggara ketertiban dan ketentraman umum, lurah turut ikut serta dalam kerjasama tentang kegiatan ketertiban umum untuk memutuskan dan mengawasi setiap proses rapat serta musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) yang diselenggarakan Kelurahan Pahlawan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa koordinasi di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan belum seluruhnya efektif. Terbukti dari sasaran dan tujuan terbentuknya pos keamanan yang idealnya 10 pos keamanan hanya 3 pos keamanan yang terbentuk di Kelurahan Pahlawan. Koordinasi belum dapat berjalan efektif disebabkan oleh kerjasama yang dilakukan kelurahan belum melibatkan masyarakat sepenuhnya.

Pihak kelurahan telah melibatkan seksi ketentraman dan ketertiban umum yang berjumlah 1 orang dan seluruh kepala lingkungan sebanyak 10 orang dari 15 lingkungan kelurahan untuk mencapai ketertiban umum di Kelurahan Pahlawan. Dalam proses kerjasama yang dilakukan, Kelurahan Pahlawan mengedepankan aspirasi masyarakat sehingga semua pihak yang ikut serta dalam kerjasama bisa mencapai hasil akhir dari diselenggarakannya kegiatan ketertiban umum.

Namun hal tersebut belum bisa di wujudkan secara nyata di Kelurahan Pahlawan dikarenakan masih terdapat masyarakat yang enggan untuk turut ikut serta dalam kegiatan ketertiban umum. Sedangkan dalam komunikasi yang terjadi antara pihak kelurahan dalam kerjasama yang melibatkan seksi ketentraman dan ketertiban umum serta kepala lingkungan merupakan komunikasi vertikal yaitu komunikasi yang terjalin dari atas ke bawah dan komunikasi atau interaksi ini terjadi secara timbal balik. Adapun interaksi atau komunikasi yang terjalin antara pihak kelurahan dengan masyarakat belum efektif dikarenakan dalam kerjasama yang dilakukan kelurahan masih banyak masyarakat yang tidak ingin turut serta dengan membayar biaya keamanan. Dalam melakukan kerjasama pihak kelurahan melibatkan masyarakat Kelurahan Pahlawan yang dijembatani oleh kepala lingkungan yang bertugas menyampaikan dan memberi pemahaman mengenai tujuan kegiatan ketertiban umum yang diselenggarakan Kelurahan Pahlawan.

Selain itu, wewenang (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Lurah sebagai pemegang wewenang tertinggi di Kelurahan Pahlawan sudah cukup baik dalam menggunakan haknya untuk memerintah organ organisasi yang terdapat di kelurahan, dilihat dari keterlibatan lurah dalam kegiatan ketertiban umum di kelurahan belum maksimal sebagai penyelenggara kegiatan ketertiban dan ketentraman umum. Dalam melakukan kerjasama lurah memegang kekuasaan sebagai penyelenggara ketertiban dan ketentraman umum, lurah turut ikut serta dalam kerjasama tentang kegiatan ketertiban umum untuk memutuskan dan mengawasi setiap proses rapat serta musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) yang diselenggarakan Kelurahan Pahlawan.

Berdasarkan hasil dari setiap kategorisasi yang sudah ada hasil temuannya, maka dapat diketahui bahwa Efektivitas Koordinasi Kelurahan Dalam Pengelolaan Ketertiban dan Ketentraman Umum Di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari komunikasi serta kerjasama yang dilakukan pihak kelurahan dengan melibatkan seksi ketentraman dan ketertiban umum, kepala lingkungan serta masyarakat Kelurahan Pahlawan belum mampu mengajak semua masyarakat Kelurahan Pahlawan untuk berpartisipasi ikut serta dalam kegiatan ketertiban umum.

REFERENSI

- Adhani, A., MAP, A. S. S. S., Anshori, A., Sos, S., Sinaga, C. N. A., Sos, S., ... & Ulayya, A. (2022). Relasi Media dan Kampus (Rekam Jejak FISIP UMSU dalam Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 dan Masa Pandemi Covid-19) (Vol. 1). umsu press.
- Adhani, A., Anshori, A., & Mahardika, A. (2022). Public Attitudes towards the Government's Policy Communication in Preventing COVID-19. *Jurnal ASPIKOM*, 7(1), 61-70.
- Adhani, A., MAP, A. S. S. S., Anshori, A., Sos, S., Sinaga, C. N. A., Sos, S., ... & Ulayya, A. (2022). Relasi Media dan Kampus (Rekam Jejak FISIP UMSU dalam Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 dan Masa Pandemi Covid-19) (Vol. 1). umsu press.

- Anshori, A., Sos, S., Kom, M. I., Mahardika, A., Sos, S., MAP, A. S. S. S., ... & Tanjung, Y. (2021). Isu-Isu Global & Kontemporer Analisis dan Fakta Lapangan (Vol. 1). umsu press.
- Agus, E., & Ali, K. (2022). Environmental Education for High School and Vocational School of Muhammadiyah City of Medan Based On Islam. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 5(1), 930-937.
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. Warta Dharmawangsa, 14(4), 602-614.
- ALI, K. (2018). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENCAIRAN DANA DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) PERCONTOHAN YOGYAKARTA (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Ali, K., & Rizky, R. N. (2021). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENCAIRAN DANA DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) MEDAN I. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(2).
- Hajar, S., & Tanjung, I. S. (2020). Aplicación de un enfoque participativo en el empoderamiento de las aldeas costeras. *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*.
- Hajar, S., Tanjung, I. S., & Yenni, E. (2017, October). Empowerment of Coastal Community Through Village Potential. In *International Conference on Public Policy, Social Computing and Development 2017 (ICOPOSDev 2017)* (pp. 297-299). Atlantis Press.
- Hajar, N. K. D. S., Amrizal, D., Izharyah, J. R., & Mahardika, A. (2022). Perencanaan Pembangunan & Pembuatan Kebijakan Daerah: Dari Teori Ke Praktik (Vol. 1). umsu press.
- Hajar¹, S., Ali, K., & Saputra, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 6(1), 136-142.
- Hartanto, D., & Siregar, S. M. (2021). Determinants of overall public trust in local government: Meditation of government response to COVID-19 in Indonesian context. *Transforming Government: People, Process and Policy*.
- Hartanto, D., Hidayat, N., & Sazali, H. (2019, January). The Leadership of Head of the Medan City Police Department in Strengthening Community Systems. In *1st Aceh Global Conference (AGC 2018)* (pp. 205-209). Atlantis Press.
- Izharyah, J. R., & Lubis, F. H. (2020). Analysis of Masterplan in Medan City Determining the Strategic Area (KSK) Social Culture Fields in Medan. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 3(4), 2821-2834.
- Izharyah, J. R. (2020). Analisis Strategis Pemko Medan Dalam Melakukan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Open Dumping Menjadi Sanitary Landfill. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 4(2), 109-117.
- Izharyah, J. R. (2022, February). Community Social Phenomenon as A Preventive Action and Disaster Mitigation of Longsor Disasters in Simalungun District. In *PROCEEDING INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE* (Vol. 1, p. 397). umsu press.
- Martinelli, I. (2021). Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen. *Jurnal SOMASI*, 2(1), 32-43.
- Khairiah, N., Rahmi, A., & Martinelli, I. (2021). Management of Overseas Refugees in North Sumatra in the Perspective of Human Security. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(4), 12077-12089.
- Khairiah, N., Rahmi, A., & Martinelli, I. (2021). Management of Overseas Refugees in North Sumatra in the Perspective of Human Security. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(4), 12077-12089.
- Kusnita, N., Wibowo, Y. S., Tanjung, I. S., & Nugroho, R. (2021). Analisis Kebijakan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar dalam Mendukung Potensi Bisnis Transportasi Laut Kepulauan Riau. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(6), 724-734.

- Martinelli, I. (2017). Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 308-328.
- Martinelli, I., Khairiah, N., Nasution, N., & Khairani, L. (2021). Socialization of the quality of school graduates to increase society participation in achieving high-quality education. *Community Empowerment*, 6(12), 2303-2314.
- Martinelli, I., Khairiah, N., Nasution, N., & Khairani, L. (2021). Socialization of the quality of school graduates to increase society participation in achieving high-quality education. *Community Empowerment*, 6(12), 2303-2314.
- Mavianti, M., & Rizky, R. N. (2019, October). Upaya Pemanfaatan Bonggol Pisang Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Pada Ibu-Ibu Di Dusun 2 Desa Tanjung Anom. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 138-143).
- MAHARDIKA, A. (2017). TEKNIK PEMBERIAN PAKAN (CAKE) PADA LARVA IKAN KOI (*Cyprinus carpio*) DI INSTALASI BUDIDAYA AIR TAWAR PUNTEN, KOTA BATU, JAWA TIMUR.
- Mujahiddin, M., & Mahardika, A. (2018). Analisis Potensi Konflik antara Pemerintahan Desa dan Masyarakat Pasca Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang). *Warta Dharmawangsa*, (55).
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 255-270
- Rahmi, A., Salamah, U., & Khairiah, N. (2021). Edukasi Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Bagi Pengurus 'Aisyiyah Di Medan. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2(2), 246-256.
- Rizky, R. N., & Mavianti, M. (2019, October). Keripik Kelapa: Peluang Usaha Baru di Dusun 3 Tanjung Anom, Deli Serdang. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 311-318).
- Rizky, R. N., & Moulita, M. (2017). PENANAMAN NILAI-NILAI ISLAM MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA PADA ANAK. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 206-219.
- Rizky, R. N. (2017). Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa dan Hak Anak. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study (E-Journal)*, 3(2), 87-96.
- Roziqin, A., Adejaya, M. S., & Ali, K. (2019, October). Strengthening local economy through tourism village: Case study in Dukuh Dalem, Sleman Regency. In *Iapa Proceedings Conference* (pp. 173-179).
- Saputra, A., & Ali, K. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PARIWISATA TERHADAP PENGELOLAAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN SAMOSIR. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 564-584.
- Syahputra, B. P., & Tanjung, I. S. (2019). Membangun Sinergi Pusat Karir dan Program Studi Melalui Program Tracer Study dan Pengembangan Karir Lulusan. *Proceeding Indonesian Carrier Center Network (ICCN) Summit*
- Syahreza, M. F., & Tanjung, I. S. (2018). Motif dan Pola Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi UNIMED. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 61-84.
- Tanjung, H., Handoko, Y., Tanjung, I. S., & Yuniarsa, S. O. (2022, March). CREATIVITY AND INNOVATION IN SMALL BUSINESS: A DIGITAL SYSTEM LITERATURE REVIEW WITH ROUND MAP NEW NORMAL. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 795-802).
- Tanjung, E. F., Harfiani, R., & Sampedro Hartanto, H. (2021). Formation of Soul Leadership Model in Indonesian Middle Schools. *Educational Sciences: Theory And Practice*, 21(1), 84-97.

- Tanjung, I. S., & Putri, S. P. (2022). Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui Tindakan Preventif Untuk Mewujudkan Desa Tangguh Covid-19. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 3(1), 119-123.
- Tanjung, I. S., Tanjung, H., & Wibowo, Y. S. (2021). Development of Tourism Communication Model Based on Local Wisdom in Padangsidempuan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 9877-9885.
- Yusni, M., & Asmadi, E. (2020). ENHANCING LITERATURE ON PROCEDURAL JUSTICE AND ORGANIZATIONAL LEARNING: EXAMINING MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL LEARNING AND ORGANIZATIONAL TRUST. *Journal of Security & Sustainability Issues*, 10(2).
- Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). HUKUM PERIZINAN; Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek.